

Eksplorasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara pada Masa Kolonial: Implikasi dan Warisannya

Rahel Arthaida Hutajulu¹ Nadia Sarita² Edo Immanuel Sinaga³ Rosmaida Sinaga⁴
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rahelhutajulu64@gmail.com¹ nadiasarita5@gmail.com²
edoimmanuelSinaga@gmail.com³ rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola eksploitasi sumber daya alam di Sumatera Utara selama masa kolonial dan dampaknya terhadap ekonomi, struktur sosial, dan lingkungan. Pada periode kolonial, Sumatera Utara mengalami perubahan signifikan akibat pengembangan perkebunan besar, seperti tembakau, kopi, dan karet, yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Eksploitasi ini menyebabkan ketergantungan ekonomi pada komoditas ekspor, serta marginalisasi masyarakat lokal, khususnya suku Batak dan Karo, yang kehilangan hak atas tanah mereka. Selain itu, kebijakan kolonial menyebabkan kerusakan lingkungan yang masih dirasakan hingga kini, seperti deforestasi dan degradasi tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk menggali dampak jangka panjang kolonialisme. Temuan menunjukkan bahwa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam pada masa kolonial masih berlanjut hingga saat ini. Pendekatan postkolonial digunakan untuk memahami narasi sejarah dari perspektif masyarakat lokal yang selama ini terpinggirkan. Warisan kolonial ini menegaskan pentingnya upaya rekonstruksi narasi sejarah dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih adil bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: Eksploitasi Sumber Daya Alam, Kolonialisme, Sumatera Utara, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Postkolonial.

Abstract

This study analyzes the patterns of natural resource exploitation in North Sumatra during the colonial period and its impacts on the economy, social structure, and environment. During the colonial period, North Sumatra underwent significant changes due to the development of large plantations, such as tobacco, coffee, and rubber, managed by the Dutch colonial government. This exploitation led to economic dependence on export commodities, as well as the marginalization of local communities, particularly the Batak and Karo tribes, who lost their land rights. Additionally, colonial policies resulted in environmental degradation, such as deforestation and soil degradation, effects of which are still felt today. This research uses a historical approach with stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography to uncover the long-term impacts of colonialism. Findings indicate that the social, economic, and environmental impacts of natural resource exploitation during the colonial period continue to affect the region. A postcolonial approach is used to understand the historical narrative from the perspective of marginalized local communities. This colonial legacy underscores the importance of reconstructing historical narratives and promoting fairer sustainable development policies for local communities.

Keywords: Natural Resource Exploitation, Colonialism, North Sumatra, Economy, Social, Environment, Postcolonial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebelum periode kolonial, Sumatera Utara telah dikenal sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perdagangan rempah. Masyarakat lokal, yang terdiri dari suku-suku seperti Batak dan Karo, mengelola lahan berdasarkan hukum adat, menjaga keseimbangan ekologis dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (Damanik, 2019). Kawasan ini menjadi pusat perdagangan penting bagi pedagang India, Tiongkok, dan Arab. Namun, pada abad ke-19, ketika Belanda menguasai wilayah ini, eksploitasi sumber daya alam meningkat secara signifikan. Perkebunan tembakau, kopi, dan karet mulai berkembang pesat, terutama di Deli, dengan memanfaatkan tanah subur dan tenaga kerja lokal serta migran. Kegiatan ini mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat, sering kali merugikan penduduk asli yang kehilangan hak atas tanah mereka. Penebangan hutan dan penggunaan lahan secara masif menyebabkan degradasi lingkungan yang masih dirasakan hingga hari ini. Secara geografi, Sumatera Utara merupakan wilayah dengan potensi alam yang sangat besar, memiliki tanah vulkanik subur, hutan hujan tropis, dan sumber daya mineral. Potensi ini menjadikannya incaran eksploitasi kolonial, meskipun kebijakan yang diterapkan sering kali tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologi maupun hak masyarakat lokal (Veronica & Siregar, 2018).

Eksplorasi sumber daya alam di Sumatera Utara selama periode kolonial membawa dampak yang luas terhadap ekonomi lokal dan struktur sosial masyarakat. Kekuatan kolonial, terutama Belanda, mendirikan berbagai perusahaan perkebunan yang menguntungkan bagi pihak kolonial, namun menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat setempat. Pada masa itu, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk lahan subur untuk perkebunan tembakau, kopi, dan karet. Perkebunan-perkebunan ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan kolonial yang memperoleh keuntungan besar dari ekspor hasil bumi, namun di sisi lain memperburuk kondisi tenaga kerja lokal yang sering kali dipaksa bekerja di bawah tekanan yang berat. Selain itu, dampak dari eksploitasi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi. Penebangan hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan mengakibatkan degradasi lingkungan yang parah. Seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi akar masalah lingkungan yang masih dihadapi oleh Sumatera Utara hingga saat ini, termasuk deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kebijakan kolonial yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas kelestarian lingkungan telah meninggalkan warisan lingkungan yang sulit diperbaiki.

Salah satu masalah utama yang muncul dari eksploitasi ini adalah bagaimana kekuatan kolonial mengabaikan hak-hak masyarakat lokal terhadap tanah mereka sendiri. Hukum adat (adat) yang mengatur pengelolaan tanah dan sumber daya setempat sering kali dikesampingkan oleh kebijakan negara kolonial, yang menyebabkan konflik antara pemerintah kolonial dan masyarakat adat. Seperti yang dicatat oleh McCarthy (2006), eksploitasi yang tidak terkendali sering kali memicu penipisan sumber daya, memperparah ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak kolonial. Kolonialisme mengubah ekonomi Indonesia dengan memusatkan produksi komoditas ekspor, yang menyebabkan ketergantungan pada pasar internasional. Pengaruh budaya Barat masuk melalui pendidikan dan agama, menciptakan kesenjangan sosial. Sementara itu, lingkungan mengalami kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti deforestasi dan degradasi tanah. Teori postkolonialisme membantu memahami dampak kolonialisme jangka panjang, termasuk di Sumatera Utara. Konsep "hibriditas" menggambarkan campuran budaya kolonial dan lokal. Teori ini juga

mengkaji bagaimana narasi kolonial sering mengabaikan pengalaman masyarakat lokal, dan mendorong rekonstruksi sejarah dari perspektif mereka yang terpinggirkan (Ploeg, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola eksploitasi sumber daya alam di Sumatera Utara selama periode kolonial, serta memahami dampaknya terhadap ekonomi, struktur sosial, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengkaji warisan sejarah kolonial yang masih mempengaruhi masyarakat modern di Sumatera Utara, serta menyoroti pentingnya perspektif masyarakat lokal dalam narasi sejarah yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian sejarah umumnya melibatkan lima tahap utama, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah untuk memastikan keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), serta penulisan (Kuntowijoyo, 1995:89). Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian sejarah yang mencakup beberapa tahapan, yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi terhadap data yang diperoleh, dan tahap terakhir adalah historiografi (penulisan). Penyajian hasil penelitian biasanya disusun dalam tiga bagian utama: pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan di berbagai lembaga arsip dan perpustakaan di Sumatera Utara. Beragam arsip berhasil dikumpulkan, termasuk dokumen dan laporan tahunan terkait aktivitas ekonomi dan pembangunan di Sumatera Utara pada masa kolonial. Di antaranya, ditemukan laporan tahunan dari beberapa perusahaan Belanda yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Selain itu, terdapat surat-surat dari pejabat kolonial yang berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur, seperti landasan pesawat terbang dan jalur kereta api, disertai rincian biaya serta peta wilayah. Dokumen-dokumen ini memberikan wawasan penting mengenai kebijakan kolonial dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.

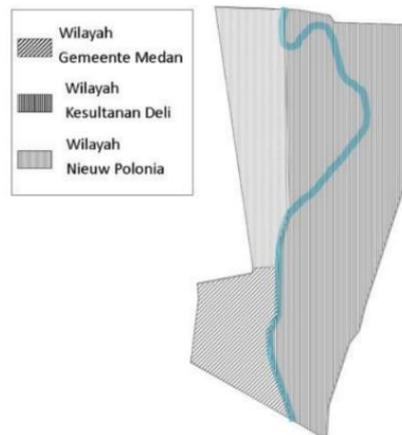
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian mengenai eksploitasi sumber daya alam di Sumatera Utara selama masa kolonial, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi yang mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi, serta warisan kolonial yang masih terasa hingga saat ini.

Pola Eksploitasi Sumber Daya Alam oleh Pemerintah Kolonial

Eksploitasi sumber daya alam di Sumatera Utara dimulai dengan berkembangnya perkebunan besar pada abad ke-19. Wilayah Deli, misalnya, menjadi pusat perkebunan tembakau dan karet, yang pada akhirnya mendominasi ekonomi lokal. Pembangunan perkebunan ini dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal serta pekerja migran dari luar, terutama Jawa dan Cina. Sering kali, para pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi yang keras dengan upah yang minim, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan antara kolonial dan masyarakat lokal. Sistem ekonomi yang dibentuk oleh Belanda berorientasi pada ekspor hasil bumi ke pasar internasional, yang menyebabkan ketergantungan Sumatera Utara pada komoditas ekspor. Kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal yang terpaksa kehilangan hak atas tanah mereka, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekonomi tradisional yang sebelumnya berfokus pada kebutuhan lokal dan regional. Perkembangan kawasan kajian sangat dipengaruhi oleh kemajuan Kota Medan selama masa kolonial (Gambar 1). Pemerintah kolonial memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang menentukan fungsi sebuah kota, seperti menjadi kota pertahanan, pemerintahan, atau peristirahatan, yang

pada akhirnya mempengaruhi fasilitas pendukung yang dibutuhkan (Handinoto, 2014). Hal ini juga berlaku di kawasan kajian yang berada di Kota Medan, yang berperan sebagai kota pemerintahan, meskipun kota ini juga berfungsi sebagai sentra produksi, distribusi, dan perdagangan. Kota Medan memiliki struktur jalan yang teratur, dengan pola jalan lurus yang saling menyilang (Handinoto, 2014). Sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, Kota Medan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti jalur kereta api dan jalan raya. Salah satu jalan utama, Jl. Brigjen Katamso, sudah ada sejak era kolonial Belanda dan dulunya dikenal sebagai Paleisweg atau Jalan Istana (In de Archipel, 2017).



Gambar 1. Pembagian Kawasan Kajian Berdasarkan Kepemilikan Wilayah

Sumber: (Veronica & Siregar, 2018)

Nama Paleisweg diberikan karena jalan ini menghubungkan dua titik strategis, yaitu pusat pemerintahan Belanda yang ditandai dengan Esplanade (sekarang Lapangan Merdeka) dan pusat pemerintahan Kesultanan Deli di Istana Maimoon. Kehadiran Paleisweg yang menghubungkan lokasi-lokasi penting ini berperan besar dalam perkembangan kawasan kajian. Sebelum tahun 1920, kawasan ini hanya berupa lahan hijau, namun kemudian diminati karena adanya akses strategis yang disediakan oleh Paleisweg. Pada umumnya, pembentukan kota awal mengikuti pola organik yang berkembang berdasarkan sumber penghidupan seperti sungai (Kostof, 1991). Sungai biasanya menjadi pusat perkembangan kawasan karena menyediakan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai jalur transportasi. Namun, di kawasan kajian, perkembangan lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun pada awalnya transportasi air memainkan peran penting dalam distribusi perdagangan, dengan hadirnya teknologi transportasi darat yang dibawa oleh bangsa Eropa, terjadi pergeseran sistem transportasi. Masyarakat mulai meninggalkan jalur sungai dan lebih mengandalkan transportasi darat (Qomarun & Prayitno, 2007). Ini juga terjadi di kawasan kajian, di mana lahan yang sebelumnya kosong mulai dibangun setelah dilalui oleh jalan strategis, Paleisweg (sekarang Jl. Brigjen Katamso). Meskipun jalan ini berada sejajar dengan Sungai Deli, akses mudah yang ditawarkan oleh Paleisweg membuat masyarakat lebih memilih membangun pemukiman di sepanjang jalan tersebut daripada di sepanjang sungai. Sebagai pusat produksi, distribusi, dan perdagangan, Kota Medan menarik banyak orang dari luar daerah, yang membuat kota ini berkembang pesat. Menurut catatan Anderson pada tahun 1823, Medan awalnya hanya dihuni oleh sekitar 200 orang, tetapi kemudian berubah menjadi kota penting yang didatangi oleh imigran (BWS, 2013). Hal ini berdampak pada pertumbuhan kawasan kajian. Perbedaan kebijakan politik yang berlaku menyebabkan pola pertumbuhan yang berbeda.

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat Lokal

Perubahan struktur ekonomi akibat perkebunan kolonial tidak hanya menguntungkan pihak kolonial, tetapi juga mengubah tatanan sosial masyarakat lokal. Masyarakat adat, terutama suku Batak dan Karo, yang sebelumnya hidup dalam struktur sosial berbasis hukum adat (adat), mulai kehilangan kontrol atas tanah mereka. Hak-hak atas tanah diambil alih oleh pemerintah kolonial, dan hukum adat secara perlahan digantikan oleh sistem hukum kolonial yang memprioritaskan kepentingan ekonomi asing. Upaya pemerintah kolonial memecah etnik Karo dipengaruhi oleh Perlawanan Sunggal (1872-1895) yang dipimpin Badiuzaman Surbakti melawan Sultan Deli dan kolonial Belanda. Perlawanan ini merugikan pengusaha perkebunan dan menimbulkan kekhawatiran akan perlawanan lebih besar dari etnik Karo, seperti perlawanan Kiras Bangun (1901-1904) (Pelzer, 1988). Pada masa Pemerintah Militer Jepang, Perlawanan Aron di Arhemia bertujuan merebut tanah perkebunan (Pemdasu, 1994). Selama Agresi Militer I dan II, muncul perlawanan dari Djamin Gintings, Selamat Ginting, dan Payung Bangun (Prima, 1976; Pangdam II, 1997). Perlawanan Sunggal terjadi akibat konsesi wilayah tanpa persetujuan Badiuzaman Surbakti dan hilangnya peran Datuk Sunggal dalam perdagangan opium setelah diambil alih Sultan Deli (Sinar, 1988; Erman, 2017). Perlawanan ini memicu kekhawatiran pemerintah kolonial akan potensi perlawanan lebih besar dari etnik Karo yang memiliki ikatan kekerabatan antara wilayah pegunungan dan dataran rendah (Pelzer, 1988). Untuk meredam ancaman, Belanda memisahkan etnik Karo di pegunungan dari yang di dataran rendah (Stoler, 1985), didorong juga oleh penemuan ladang minyak di Karo Jehe oleh Zijlker pada tahun 1883 (Ramadhan, 2008). Masyarakat yang bekerja di perkebunan tidak hanya mengalami ketidakadilan ekonomi, tetapi juga mengalami pergeseran sosial. Muncul kelas pekerja baru yang bergantung pada sistem perkebunan, namun dengan hak dan upah yang terbatas. Kondisi ini menciptakan ketegangan sosial yang memicu berbagai bentuk perlawanan, baik dalam bentuk mogok kerja maupun pemberontakan bersenjata.

Dampak Lingkungan dan Degradasi Sumber Daya Alam

Penebangan hutan secara besar-besaran untuk perluasan perkebunan menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Hutan-hutan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat lokal berdasarkan sistem hukum adat dihancurkan untuk membuka lahan bagi perkebunan komoditas ekspor. Proses deforestasi ini menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas tanah, dan perubahan pola cuaca lokal. Selain itu, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan memicu erosi tanah dan kerusakan ekosistem. Hingga kini, dampak dari eksploitasi lingkungan yang terjadi selama masa kolonial masih dirasakan, dengan tantangan-tantangan besar dalam upaya rehabilitasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Warisan Kolonial dan Relevansinya di Masa Kini

Warisan kolonial dari eksploitasi sumber daya alam tidak hanya meninggalkan jejak fisik berupa perubahan lanskap, tetapi juga membawa dampak struktural yang berkelanjutan hingga hari ini. Ekonomi Sumatera Utara masih sangat bergantung pada komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet, yang awalnya diperkenalkan oleh kolonial. Ketergantungan pada pasar ekspor serta kontrol atas tanah oleh segelintir pihak masih menjadi masalah ekonomi yang berakar dari masa kolonial. Di sisi sosial, ketimpangan yang terjadi selama kolonialisme masih tercermin dalam hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal, terutama dalam masalah hak atas tanah. Sistem hukum adat yang dulu kuat

telah terkikis, dan dalam banyak kasus, masyarakat adat masih menghadapi kesulitan dalam mengklaim kembali hak-hak mereka atas tanah yang dulunya milik leluhur mereka.

Teori Postkolonialisme dan Rekonstruksi Narasi

Melalui pendekatan postkolonialisme, penelitian ini menyoroti pentingnya merekonstruksi narasi sejarah dari perspektif masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Narasi kolonial cenderung mengabaikan peran masyarakat lokal dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebaliknya, sejarah sering kali hanya menyoroti pencapaian kolonial dalam mengembangkan ekonomi melalui perkebunan besar, tanpa memperhitungkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditinggalkannya. Konsep "hibriditas" dalam teori postkolonial menggambarkan bagaimana budaya lokal dan kolonial bercampur selama masa kolonial. Namun, penting untuk diingat bahwa campuran ini sering kali tidak terjadi secara setara, melainkan didorong oleh dominasi budaya kolonial yang menindas budaya lokal. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan suara bagi masyarakat adat Sumatera Utara yang selama ini sering dilupakan dalam narasi sejarah kolonia

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dampak signifikan eksploitasi sumber daya alam di Sumatera Utara selama masa kolonial, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada masa kolonial, eksploitasi sumber daya alam dilakukan melalui pengembangan perkebunan besar yang didominasi oleh komoditas ekspor seperti tembakau, karet, dan minyak sawit. Pola ekonomi ini menciptakan ketergantungan pada pasar internasional dan meminggirkan hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka. Kehilangan kontrol atas tanah, serta penerapan hukum kolonial yang menggantikan hukum adat, mengakibatkan perubahan sosial mendalam, terutama pada masyarakat adat seperti suku Batak dan Karo. Eksploitasi ini juga menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi besar-besaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Selain itu, munculnya kelas pekerja yang terikat pada sistem perkebunan kolonial dengan upah rendah menciptakan ketegangan sosial yang memicu perlawanan, baik dalam bentuk mogok kerja maupun pemberontakan. Warisan kolonial masih terasa hingga kini dalam bentuk ketergantungan ekonomi Sumatera Utara pada komoditas perkebunan, ketimpangan kepemilikan tanah, dan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah leluhur. Pendekatan postkolonial dalam penelitian ini menekankan pentingnya merekonstruksi narasi sejarah dari perspektif masyarakat lokal yang terpinggirkan. Narasi sejarah kolonial cenderung mengabaikan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditinggalkan, serta menekankan dominasi budaya kolonial atas budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif tentang warisan kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan, serta pentingnya upaya rehabilitasi ekonomi dan ekologi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, E. L. (2019). Gugung dan Jehe: Pembelahan Etnik Karo di Sumatra Utara. Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya, 3(1), 1-32.
- Gemeente Medan. (1934). Gemeente Medan 1909-1934. <http://colonialarchitecture.eu/islandora/object/uid%3A0ba6fc94-c142-43c5-93cf8c5a9c5c8d3>. Diakses 5 November 2017.

- Handinoto. (2004). Kebijakan Politik dan Ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda Yang Berpengaruh Pada Morfologi (Bentuk dan Struktur) Beberapa Kota Di Jawa. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 32(1), 19-27.
- Pangdam II/BB, T.A. (1977). *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II Bukit Barisan*. Medan: Dinas Sejarah Kodam II Bukit Barisan.
- Pelzer, K. J. (1988). *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur, 1863-1847*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pemdasu. (1994). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*. Medan: Pemdasu dan Diklat Propsi.
- Prima, B. S. (1976). *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi*. Medan: Badan Musyawarah Perjuangan Republik Indonesia Medan Area.
- Rick, van der, Ploeg. (2010). *Rapacious Resource Depletion, Excessive Investment and Insecure Property Rights*. Social Science Research Network.
- Stoler, A. L. (1985). *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*. New Haven: Yale University Press.
- Veronica, S., & Siregar, R. W. (2018). *Pengaruh Masa Kolonial Terhadap Struktur Ruang Kawasan (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso-Jl. Avros-Jl. Karya Jaya-Jl. A.H. Nasution, Medan)*